



Pemkot Mantap Berikan Sanksi

■ Presiden Keluarkan Inpres Soal Penegakan Protokol Kesehatan



*Nah, sekarang
sudah semakin
kuat dan men-
jadi landasan
hukum kita.
Artinya, peme-
rintah daerah
sekarang ini
makin memung-
kinkan untuk
mengambil tin-
dakan.*

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta siap menyelaraskan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di masa Tatanan Normal Baru dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dalam instruksi tersebut, Jokowi memerintahkan seluruh kepala daerah, untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19. Yakni, meliputi kewajiban mematuhi protokol kesehatan, baik individu, maupun perlindungan kesehatan masyarakat dengan konsekuensi sanksi.

● ke halaman 15

Pemkot Mantap Berikan

● Sambungan Hal 9

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, sebelum presiden mengeluarkan instruksi, pihaknya sudah lebih dahulu menuangkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan melalui Perwal Nomor 51/2020. Walau begitu, Pemkot bersedia jika harus melakukan penyelesaian.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan soal konsekuensi sanksi terhadap masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Hukuman pada pelanggar tersebut, meliputi teguran lisan, atau tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, hingga denda uang tunai sebesar Rp100.000.

"Secara teknis hukum, Perwal itu sudah kami jalankan lebih dulu. Tapi, kalau memang harus disesuaikan dengan aturan yang ada di atasnya, ya mau tidak mau, kami bakal lakukan penyesuaian," katanya saat dikonfirmasi Kamis (6/8).

Ia tidak memungkiri, selama ini banyak muncul pertanyaan terkait seberapa jauh kekuatan Perwal dalam memberikan tindakan tegas bagi masyarakat yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, keberadaan Inpres No. 6/2020 ini sekaligus menguatkan landasan hukum.

"Nah, sekarang sudah semakin kuat dan menjadi landasan hukum kita. Artinya, pemerintah daerah sekarang ini makin memungkinkan untuk mengambil tindakan," ucapnya.

"Selama ini kita coba mendisiplinkan masyarakat dengan memberikan sanksi sosial, maupun denda. Instruksi dari presiden itu saya rasa semangatnya hampir sama dan Pemkot akan memperkuatnya," tambah Heroe.

Terlebih, tren kasus Covid-19 di wilayahnya belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga butuh semacam treatment, bagi mereka yang masih abai terhadap situasi pandemi. Dengan begitu, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan meningkat.

"Perwal dan Inpres itu kan untuk membangun kesadaran masyarakat. Kita akan terus mendorong bagaimana agar masyarakat itu ikut serta menjadi bagian dari upaya pemutusan rantai penularan virus," tegasnya.

"Saya sudah minta pada teman-teman di lapangan, karena kondisinya seperti ini, supaya dilakukan tindakan-tindakan tegas saja. Ini bukan soal denda, atau sanksi-sanksi yang lain, tapi demi keselamatan kita," imbuh Heroe.

Lebih lanjut, Wawali pun mengakui, sejauh ini kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta terhadap protokol kesehatan sejatinya sudah cukup baik. Hanya saja, ia menilai, butuh penekanan lebih, untuk menggerakkan budaya saling mengingatkan di tengah-tengah masyarakat.

"Sekarang ini kami berada di tahapan saling mengingatkan untuk mentaati protokol kesehatan. Saya berharap, warga masyarakat bisa melakukannya dengan baik, seperti pada tahapan-tahapan sebelumnya," pungkasnya.

Sosialisasi dan edukasi

Namun, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)

Kota Yogyakarta, Agus Winarto, mengakui, sejak peraturan diteken oleh Wali Kota, Haryadi Suyuti pada bulan Juli lalu, pihaknya sama sekali belum pernah memberikan tindakan tegas, meski sering kali menjumpai masyarakat yang melanggar protokol.

"Selama ini kita mengutamakan sosialisasi dan edukasi, bahkan fasilitasi juga. Saat ketemu orang yang tidak pakai masker, ya kami kasih tahu. Kalau dia tidak bawa, kita kasih masker biar segera dipakai," katanya.

Agus tidak memungkiri, hingga sekarang, saat tren kasus Covid-19 di kota pelajar mengalami peningkatan signifikan, masih banyak dijumpai para pelanggar protokol kesehatan. Namun, diakuinya, Satpol PP lebih sering menemukan pelanggaran di objek wisata ramai pengunjung.

"Terutama di Malioboro. Tapi, kami tetap mengedepankan teguran saja, kita edukasi, dia itu dilihat banyak orang saja sudah malu seharusnya. Apalagi, kebanyakan pengunjung Malioboro kan dari luar kota. Kami tegaskan, bagaimana prosedurnya saat masuk sini," terangnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005